

BKKBN DAN MASALAH KEPENDUDUKAN

Oleh : Haryono Suyono

Setiap tanggal 29 Juni Indonesia memperingati Hari Keluarga Nasional. Setiap tanggal 11 Juli Indonesia juga ikut memperingati Hari Kependudukan Dunia. Dari berbagai upacara peringatan itu banyak rakyat Indonesia makin memahami makna kependudukan dan peranannya dalam pembangunan, termasuk peranan penduduk sebagai ujung tombak pembangunan yang berkelanjutan. Selama ini, bersama dengan Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Tenaga Kerja, BKKBN telah memberikan peran dan sumbangannya yang signifikan dalam membangun sumber daya manusia. Kalau masih ada yang menyangsikan peranan BKKBN khususnya, dan peranan penduduk dalam pembangunan, kita semua menjadi sedih dan harus bertanya apa makna berbagai upacara besar yang biasanya diadakan dalam berbagai hari kependudukan itu.

Penduduk Indonesia tahun 2000 yang semula diperkirakan akan mencapai sekitar 275 juta jiwa, ternyata dengan BKKBN dan bantuan jajaran pembangunan lainnya telah berhasil membantu keluarga Indonesia menghasilkan penduduk yang jumlahnya hanya sekitar 206 juta jiwa saja. Keberhasilan itu adalah karena tingkat fertilitas atau tingkat kelahiran yang biasanya setiap keluarga melahirkan sekitar 6 anak, telah berhasil diturunkan dengan lebih dari 50 persen, sehingga setiap keluarga hanya melahirkan kurang dari 3 orang anak. Dalam waktu yang bersamaan tingkat kematian bayi dan anak-anak juga turun drastis. Dengan jumlah anak yang jauh lebih sedikit dan lebih sehat para orang tua dapat memberi perhatian yang lebih tinggi dan lebih mampu untuk menyekolahkan anak-anak itu ke sekolah pilihannya.

Dengan program KB yang berhasil dan program wajib belajar 9 tahun yang sebagian besar telah berhasil, ternyata anak-anak usia sekolah dasar sekarang hampir seluruhnya telah dapat memasuki sekolah dasarnya. Dengan tekad yang lebih gigih anak-anak itu melanjutkan ke sekolah menengah pertama untuk melengkapi keberhasilan wajib belajar 9 tahun tersebut. Gara-gara program KB yang berhasil, murid kelas I dan kelas II SD berkurang jumlahnya. Karena itu banyak sekolah dasar yang sekarang di konversi dengan membentuk afiliasi dengan SLTP setempat untuk menampung anak-anak tamatan SD dalam melanjutkan ke sekolah menengah pertama. Ini berarti bahwa kerjasama antara bidang pendidikan dan bidang KB telah berhasil membuat anak-anak kita lebih pandai.

Namun demikian, penanganan persoalan penduduk di Indonesia belum selesai. Dewasa ini penduduk Indonesia justru sedang berada pada ambang yang lebih gawat dibandingkan dengan persoalan kependudukan yang kita hadapi dalam tahun 1960 atau 1970-an yang lalu. Pertambahan dan proporsi penduduk sedang mengarah kepada penduduk urban dengan kecepatan yang tinggi. Pertambahan penduduk urban itu bukan hanya karena adanya migrasi penduduk perdesaan ke kota, tetapi juga karena desa-desa bertambah maju dan penduduk desa tersebut, siap atau tidak, karena “desanya” berubah menjadi “kota”, dengan otomatis dan secara bersama-sama berubah menjadi “penduduk kota” atau “penduduk urban”.

Dinamika perkembangan penduduk desa menjadi penduduk kota yang terjadi dengan kecepatan tinggi itu bukan hanya monopoli bangsa Indonesia saja. Phenomena itu adalah suatu kejadian luar biasa dalam akhir abad ke-20 yang terjadi di banyak negara berkembang. Kejadian ini, dengan segala implikasi sosial, budaya dan politik yang cukup rumit, kurang mendapat perhatian para ahli, politisi dan penyelenggara negara. Untung saja perubahan itu terjadi seiring dengan makin turunnya angka fertilitas dan angka pertumbuhan penduduk secara menyeluruh. Kalau saja angka pertumbuhan penduduk tidak menurun secara drastis barangkali dalam waktu segera akan terjadi peledakan penduduk yang lebih dahsyat dibandingkan keadaan peledakan yang terjadi pada tahun-tahun 1960 atau 1970 yang lalu.

Namun demikian, biarpun tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia telah menurun, tahun ini penduduk Indonesia telah lebih dari **211 juta jiwa**. Kalau tren perkembangan penduduk Indonesia tetap dalam keadaan menurun memang Indonesia bakal bisa mencapai keadaan penduduk tumbuh seimbang, yaitu jumlah penduduk yang lahir sama dengan jumlah penduduk yang meninggal dunia. Tetapi kalau keadaan berbalik maka tidak mustahil penduduk Indonesia akan kembali bergolak dan menanjak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ada beberapa alasan kenapa kita harus tetap waspada menghadapi pertumbuhan penduduk yang bisa meningkat dengan lebih drastis lagi.

Transisi Demografi

Semestinya ada dua pola transisi demografi yang terjadi dengan segala implikasinya. Transisi demografi model yang pertama terjadi dengan lamban yaitu di **negara-negara Eropa** seperti **Inggris** dan **Wales**. Transisi demografi model pertama yang berlangsung relatif lamban itu mulai sekitar **tahun 1700** sampai **sekitar tahun 1950-an**. Dalam proses transisi tersebut tingkat kematian turun dengan pelahan karena kemajuan industrialisasi yang terjadi di negara-negara tersebut. Adanya transisi itu menyebabkan nilai-nilai kultural tentang berbagai fenomena berubah secara pelahan.

Dalam masa transisi yang relatif lama itu masyarakat mempunyai waktu yang cukup lumayan untuk melakukan penyesuaian dengan pelahan, berubah dari masyarakat yang tradisionil perdesaan pelahan-lahan menjadi masyarakat industrial perkotaan yang makin modern. Tingkat kesehatan dan tingkat pendidikan penduduk bertambah baik dan lebih siap melakukan atau menerima berbagai perubahan dengan rasional. Kehidupan sosial politik penduduk juga mulai mengalami perubahan dengan mengembangkan kemampuan ekspresi politik yang makin terbuka dan vokal menuju masyarakat yang makin liberal demokratik.

Biarpun agak terlambat, negara-negara berkembang mengikuti juga proses transisi demografi tersebut. Anehnya, pada awal transisi, angka kematian pada **tahun 1900** relatif sangat tinggi dan baru mulai menurun pada sekitar tahun 1920-an. Angka itu menurun lebih tajam pada sekitar tahun 1940-1950. Proses penurunannya agak berbeda. Di negara-negara berkembang penurunan itu lebih banyak dipengaruhi oleh diketemukannya pengobatan modern dan munculnya lembaga-lembaga internasional dengan advokasi dan

langkah-langkah nyata secara global. Namun demikian, untuk penyesuaiannya, tingkat kelahiran juga segera menurun, *tidak harus menunggu 150 tahun*. Tingkat kelahiran itu turun menyusul penurunan tingkat kematian dalam kurun waktu *kurang dari 50 tahun*.

Penurunan tingkat kematian terjadi di negara-negara dengan jumlah penduduk besar yang secara sungguh-sungguh melaksanakan program KB dan kesehatan dengan komitmen yang tinggi dan lebih meyakinkan. Dengan penurunan tingkat kelahiran atau fertilitas dan tingkat kematian itu maka proses transisi demografi terjadi dengan cepat. Akibatnya tingkat pertumbuhan penduduk juga menurun dengan drastis.

Disamping kegembiraan karena adanya penurunan fertilitas dan tingkat pertumbuhan penduduk yang makin rendah, ada fenomena baru yang mengerikan, yang mungkin lebih dahsyat muncul di negara-negara berkembang. Fenomena itu adalah makin tingginya proporsi jumlah penduduk urban, ledakan remaja, angkatan kerja dan penduduk lanjut usia yang meningkat tajam dalam waktu yang pendek. Karena terjadi dalam tempo yang sangat singkat, implikasi perubahan fenomena ini pasti belum disadari secara mendalam oleh para pengambil keputusan dan politisi di negara-negara berkembang. Fenomena itu muncul dalam suasana kemiskinan dan tingkat kebodohan yang masih sangat tinggi. Tidak kurang dari *1,3 milyar jiwa* hidup dalam *kondisi sangat miskin* di negara-negara berkembang.

Karena keterbatasan anggaran fenomena yang muncul itu kemudian dicoba dibandingkan mana yang lebih dulu harus diselenggarakan. Kesimpulan semacam itu yang salah. Tidak ada yang didahulukan dengan mengorbankan salah satunya. Tidak ada upaya pendidikan yang harus mengorbankan upaya di bidang kesehatan. Tidak ada upaya di bidang kesehatan yang harus mengorbankan upaya di bidang keluarga berencana. Seluruhnya menempati posisi sentral dalam menanggapi upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia yang bermutu.

Dalam pola transisi demografi itu jelas sekali terjadi perubahan struktur piramida yang ada. Pola yang muncul di Indonesia dan negara-negara baru berkembang lainnya yang mulai berhasil dengan gerakan KB-nya adalah pola mirip dengan struktur piramida penduduk di negara maju. Pola ini menggambarkan adanya pengecilan jumlah dan proporsi penduduk yang berusia anak-anak tetapi diikuti dengan membengkaknya penduduk remaja dan penduduk lanjut usia.

Perubahan struktur itu menarik karena penduduk remaja yang sedang tumbuh itu adalah sesungguhnya hasil pendewasaan dari penduduk yang belum tersentuh dengan program KB pada jaman orang tua mereka masih remaja subur. Karena itu anak-anak yang sekarang dewasa dan menjadi orang tua muda adalah anak-anak pasangan remaja yang sangat rawan untuk kemungkinan menimbulkan bom bayi yang baru. Oleh karena itu pikiran-pikiran bahwa BKKBN sebaiknya dibubarkan adalah suatu gagasan yang sangat berbahaya.

Penduduk remaja yang sekarang ini sedang marak dan subur harus diikuti dan didampingi dengan program KB yang lebih lincah dibandingkan dengan program KB

untuk pasangan yang lebih sederhana di masa lalu. Anak-anak muda baby boomers sekarang ini adalah anak-anak modern yang maju dan mandiri. Mereka harus didampingi dengan program KB oleh BKKBN atau lembaga semacam itu pada tingkat daerah otonomi yang kental. Komitmen untuk BKKBN tingkat Kabupaten dan Kota harus sangat tinggi agar supaya diperoleh sumber daya insani yang berkualitas karena dilahirkan oleh orang tua dengan jarak kelahiran yang wajar.

Penurunan fertilitas dan pertumbuhan yang mulai rendah harus dipelihara dengan baik karena kalau tidak demikian akan lebih sulit menggarap penurunan fertilitas di masa yang akan datang. Untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan semacam itu diperlukan justru adanya komitmen yang lebih tinggi dari otoritas tingkat pusat agar proses penyelesaian di tingkat kabupaten dan kodya yang sedang memproses untuk mengambil alih BKKBN di masing-masing daerah menjadi lebih mantab, bukan dengan isue bahwa BKKBN anggarannya akan “disetorkan”-kan untuk anggaran pendidikan.

Ledakan Penduduk Urban dan Angkatan Muda

Dengan mengecilnya proporsi penduduk usia anak-anak, terjadi pembengkakan proporsi penduduk usia 25 tahun sampai 45 tahun, atau penduduk usia muda. Penduduk muda yang subur tersebut telah mendapat pendidikan dasar dan makin tidak tertarik untuk bertani seperti orang tuanya di desa. Penduduk muda itu mempunyai tendensi untuk pindah ke kota mencari pekerjaan yang bersifat “urban”, di pabrik atau industri jasa yang tidak banyak tergantung musim seperti bertani di sawah desanya.

Disamping itu penduduk yang tetap terdidik di desa mulai pula mempergunakan waktunya yang banyak untuk membangun industri dan perdagangan di desanya. Karena fasilitas transportasi yang makin baik, usaha itu makin bisa dihubungkan dengan rekan-rekannya dari kota sehingga menumbuhkan kepadatan dan ciri baru di desa-desa penyangga kota. Angkatan muda dan petani maju yang berhasil mulai ikut membangun industri dan jasa proses pasca panen di desa dan merubah infrastuktur desanya menjadi makin bersifat urban. Akibatnya pertumbuhan urban di negara-negara berkembang seperti Indonesia mempunyai dua sumber yang sama kuatnya, yaitu perpindahan penduduk ke kota dan berubahnya desa-desa agraris menjadi daerah urban yang baru, berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan penduduk urban di negara maju lain di masa lalu.

Dengan adanya keadaan seperti itu, maka jajaran BKKBN, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Tenaga Kerja dan pemerintah daerah harus makin peka terhadap fenomena kependudukan seperti itu. Karena itu adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang bermutu, lembaga-lembaga tersebut diatas justru harus ditingkatkan peranan dan anggarannya, bukan malah dibubarkan ! (*Prof. Dr. Haryono Suyono, Pengamat Masalah Sosial Kemasyarakatan. Penduduk-92002*)

PULANG MUDIK, PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

Oleh : Haryono Suyono

Umat Islam di seluruh Indonesia akan merayakan kemenangan ibadah puasa sebulan penuh dalam *Hari Raya Idul Fitri, 1 Syawal 1422 H* dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semua ummat beryukur bahwa dengan datangnya Idul Fitri, kenikmatan berpuasa dan beribadah dalam bulan Ramadhan berakhir dengan sukses. Bagi banyak pihak, kaya miskin, tua maupun muda, rasa syukur itu dijadikan momentum untuk *pulang mudik*. Karenanya peristiwa itu menjadi suatu gerakan nasional yang mandiri, luar biasa besar dan dahsyatnya. Peristiwa itu menjadi sangat unik dan tidak ada duanya di seluruh dunia.

Menurut perkiraan Departemen Perhubungan RI ada sekitar 16 – 18 juta penduduk akan pulang mudik. Mereka berbondong-bondong mempergunakan berbagai kendaraan mobil milik pribadi, mobil pinjaman, bus, kereta api, kapal laut sampai pesawat terbang. Tidak sedikit yang karena pengalaman kesulitan kendaraan pada hari-hari dekat lebaran Idul Fitri telah mendahului pulang mudik pada awal bulan Ramadhan. Tidak sedikit pula yang mempergunakan kesempatan menunggu beduk lebaran dan segera setelah sembahyang Ied langsung mengejar kereta atau bus di stasiun terdekat.

Peristiwa pulang mudik, yang unik itu adalah milik bangsa Indonesia. Peristiwa pulang mudik diikuti oleh mereka yang sangat terpelajar sampai penduduk biasa yang tidak kenal baca dan tulis. Peristiwa pulang mudik telah berlangsung lama dan tidak seorangpun, sampai dewasa ini, termasuk “*ndara-ndara*” yang mempunyai pembantu berasal dari desa, mampu membendung dengan cara apapun, termasuk memberi giliran pulang mudik sebelum atau sesudah lebaran. Daya tarik lebaran di kampung sungguh mengalahkan segala bujukan, termasuk “*money politics*” yang digelar oleh para majikan di manapun mereka berada. Tidak banyak yang tergiur iming-iming itu dan mengalah untuk pulang mudik sebelum atau sesudah Hari Raya Idul Fitri.

Apabila selama bulan Ramadhan waktu berjalan demikian cepat, dan kita tidak sempat atau belum tuntas mempergunakan waktu itu memperbesar amal ibadah yang tulus dengan sebaik-baiknya, maka kesempatan pulang mudik ini dapat dipergunakan untuk melanjutkan ibadah puasa yang telah kita persembahkan sebagai pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berbagai cara yang sangat simpatik.

Sesuai dengan ajaran yang kita yakini, hikmah berpuasa adalah meningkatkan kepedulian dan mendekatkan kita kepada anak-anak yatim piatu dan keluarga miskin. Untuk itu setiap ummat Islam diajak makin banyak melakukan usaha nyata, ikhlas, beramal mengurangi beban keluarga miskin yang sangat berat. Upaya nyata itu bisa berupa menyantuni anak yatim piatu atau membantu keluarga miskin menyiapkan segala

sesuatu selama bulan Ramadhan, atau membantu memberdayakan keluarga miskin itu untuk kehidupan yang lebih baik, sejahtera, lahir dan bathin.

Ajaran agama Islam yang kita anut memberi kesempatan yang sangat luas untuk melaksanakan amal ibadah itu, tidak saja dalam bulan Ramadhan, tetapi dapat juga dilakukan selama menikmati kebahagiaan *sambil pulang mudik*. Dalam kesempatan pulang mudik itu kita bisa sangat peduli terhadap sesama, lebih-lebih kepada keluarga miskin. Amal ibadah yang nyata itu akan menjadi ukuran dari kesalehan seseorang yang dilandasi iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam kesempatan pulang mudik, kita bisa membayar Zakat, Infak dan Sadakoh untuk menyempurnakan ibadah puasa yang telah kita lakukan selama bulan Ramadhan. Pembayaran Zakat, Infak dan Sadakoh sesuai dengan aturan yang telah diajarkan akan sangat memperkaya amal ibadah kita itu, terutama akan sangat membantu masyarakat dan keluarga yang berhak menerimanya di kampung halaman sendiri.

Apabila kita telah membayar Zakat, Infak dan Sadakoh di tempat atau di kota tempat tinggal masing-masing, pulang mudik dapat dipergunakan untuk melakukan upaya pemerataan pembangunan. Kita bisa mengadakan pertemuan sarasehan "*nostalgia*" dengan teman-teman kita di kampung untuk menyampaikan kabar gembira dan kemungkinan-kemungkinan yang terbuka di kota-kota besar. Tentu saja tanpa harus mengundang mereka untuk meninggalkan desanya pindah ke kota besar, tetapi membantu mereka mempergunakan peluang usaha yang dapat dikaitkan dengan kemungkinan yang ada di desa sehingga secara tidak langsung kita ikut membantu membangun desa dengan wawasan perkotaan. Kawan-kawan tetap tinggal di desa, tetapi usahanya kita kaitkan dengan usaha kita yang ada di kota. Desa memasok kota, dan kota membangun desa. Keterkaitan yang saling menguntungkan.

Pulang Mudik Menabung untuk Pembangunan

Salah satu gagasan yang pernah dicoba di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, di tahun 1996-1999, adalah mengundang mereka yang pulang mudik untuk tidak membawa uang tunai ke kampung kelahirannya. Mereka yang pulang mudik dianjurkan untuk menukarkan uang tunainya di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surabaya dan kota-kota lain di luar pulau Jawa dengan cek BRI atau cek dari Bank-bank lainnya. Di Wonogiri cek-cek itu diuangkan dengan berbagai cara. *Cara pertama* adalah dengan menukarkannya secara langsung ke kantor Bank Cabang yang ada di kota Wonogiri. *Cara kedua* adalah dengan membuka rekening di Kantor Cabang Bank tersebut untuk diri sendiri, atas nama saudara atau rekan sekampung yang dianggap perlu mendapat bagian rezeki yang dibawa dari kota-kota besar itu, atau atas nama usahanya di kampung halamannya itu. Dan *cara ketiga*, Bupati yang progresip pada waktu itu memberi dukungan kerjasama dengan Bank, toko-toko dan warung di Wonogiri untuk menerima pembayaran dengan cek tersebut.

Semua cara itu membebaskan setiap orang yang pulang mudik dari bahaya copet karena cek yang dibawanya bukan berupa uang tunai tetapi dalam bentuk cek atas

nama pribadi yang hanya bisa diuangkan sendiri oleh yang bersangkutan, atau yang hanya bisa ditransfer melalui bank yang harus diketahui oleh yang bersangkutan. Dengan adanya cara itu, Bank-bank langsung menganjurkan agar setiap penduduk membuka *rekening tabungan* atau rekening apapun di Bank. Pada saat pulang mudik yang kedua, tahun berikutnya, mereka yang pulang mudik tidak perlu lagi membuka rekening tabungan baru karena sudah mempunyai rekening tabungan yang dibuka pada tahun sebelumnya. Pada tahun kedua setiap orang yang membawa cek dari kota-kota besar tempatnya bekerja langsung bisa memberi hadiah kepada sanak saudaranya melalui rekening saudara-saudaranya itu di Bank yang telah dibukanya pada Hari Raya Idul Fitri sebelumnya. Pada waktu ini hampir setiap orang, kalau dipelihara dengan baik, semestinya sudah mempunyai rekening tabungan, baik tabungan *Takesra* pada Bank BRI atau Bank BNI, atau rekening tabungan lainnya.

Cara kedua memberi kesempatan bagi yang belum mempunyai rekening tabungan pada Bank di daerahnya untuk segera membuka rekening tabungan itu. Cara ini dapat dipergunakan oleh kalangan per-Bank-an untuk menggairahkan kesadaran menabung. Pemerintah Pusat dan Daerah dapat mempergunakan kesempatan pulang mudik ini untuk memindahkan dana dari kota-kota besar ke kabupaten, dan kota-kota kecil, seperti Wonosari yang disebutkan diatas. Adanya dana yang makin besar dan dipindahkan ke daerah, yang dilakukan oleh penduduk yang pulang mudik, akan menggairahkan perekonomian kerakyatan di pedesaan. Jumlah dana yang bisa ditransfer ke pedesaan pada saat pulang mudik sungguh luar biasa besarnya.

Cara ketiga belanja dengan cek ke toko-toko dan warung di desa atau kota tempat kelahiran seseorang, akan menggairahkan perdagangan dengan sistem giral di kota itu menjadi semakin marak. Bagi para pemudik sendiri merupakan kemudahan karena mereka dapat mengambil kelebihan belanja dengan cek itu berupa uang kontan tanpa harus pergi ke Bank. Dengan demikian mereka dengan mudah bisa memperoleh uang kontan ditoko atau warung yang menyediakan fasilitas itu. Sebaliknya toko-toko yang ikut serta dalam program ini secara langsung bisa menyetorkan cek-cek itu untuk dibayar atau dipindah pada rekening toko yang ada pada Bank tersebut.

Melalui ketiga sistem pembayaran dengan mempergunakan cek perjalanan itu, nilai tabungan di kota tempat kunjungan pulang mudik telah dan akan bertambah dengan jumlah yang luar biasa besarnya. Penambahan tabungan itu akan memberi kesempatan pada Bank di daerah untuk memberikan dukungan dana pada usaha-usaha pembangunan yang ada di daerah yang bersangkutan. Dengan program otonomi daerah yang marak, pemerintah daerah harus bisa memacu dan memicu para penduduk yang pulang mudik untuk mempergunakan sistem ini dengan berbagai insentif agar dana tabungan dalam bank-bank di daerah bertambah besar jumlahnya. Dan dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang dapat didukung pendanaannya juga bertambah banyak.

Dukungan untuk Pemberdayaan Keluarga

Dana penduduk yang pulang mudik dapat pula diarahkan untuk memberi dukungan kepada upaya pemberdayaan keluarga. Dana yang mengalir ke desa dapat

dijadikan *sebagai dana abadi* yang disimpan oleh Bank untuk menjamin penduduk yang berusaha di kota tetapi *“tananya bermukim di desanya”*. Kalau yang bersangkutan ingin mempergunakan uang itu, diizinkan agar bunganya saja yang dipergunakan, sementara nilai tabungannya untuk menjamin hari tuanya nanti.

Modal dan atau bunga dari dana yang disimpan itu dapat dipergunakan sebagai dukungan kredit, agunan, atau dana murah untuk meningkatkan upaya pemberdayaan sumber daya manusia yang ada dengan prioritas sebagai berikut :

- ↳ Bea siswa, khususnya untuk anak perempuan anak keluarga miskin;
- ↳ Bea belajar untuk anak keluarga miskin dalam mengikuti kursus-kursus sebagai pengantar kerja yang efektif;
- ↳ Bea magang bagi anak-anak keluarga miskin yang dititipkan pada perusahaan-perusahaan yang bersedia menampung tenaga tersebut;
- ↳ Agunan bagi keluarga miskin yang ingin mendapat pinjaman dari Bank;
- ↳ Subsidi bunga untuk para pengusaha kecil dari keluarga miskin, atau yang memperkerjakan keluarga miskin, yang sedang berlatih dan atau usahanya kurang berhasil;
- ↳ Membantu membayar cicilan bagi para pengusaha kecil yang gagal karena sesuatu sebab diluar kemampuannya;

Dengan menyimpan dana di Bank daerah itu, setiap penduduk yang pulang mudik dapat ikut membangun sumber daya manusia di desanya, kota kelahirannya dan sekitarnya. Sebagai insentif, dianjurkan agar Pemerintah Daerah, bersama organisasi masyarakat setempat, menyelenggarakan acara-acara gembira menyambut penduduk yang pulang mudik itu dengan acara-acaraa kesenian, makanan khas kampung halaman yang dirindukan, baik sebagai penghargaan atas dukungan dana yang disimpan di Bank Daerah maupun sarana memajukan seni dan budaya daerah.

Insentif dan program yang diselenggarakan oleh Pemda dan masyarakat itu dapat diperluas dengan fasilitas kemudahan kembali ke tempat asalnya. Mereka kembali ke kota tempat kerjanya seperti Jakarta, Semarang, Surabaya dan kota-kota lain, diberi kemudahan untuk tidak perlu membawa oleh-oleh yang berat. Pemerintah dan Pengusaha Daerah bisa menawarkan fasilitas paket oleh-oleh yang mudah diambil di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan lainnya. Di daerah, paket itu disiapkan oleh kelompok keluarga miskin yang sedang belajar usaha dalam program Kukesra Mandiri dan Pundi. *Peristiwa pulang mudik* sekaligus menjadi *ajang pemasaran* produk-produk dari keluarga miskin. Pulang mudik menjadi ajang upaya pengentasan kemiskinan.

Marilah kita sambut mereka yang pulang mudik sebagai pahlawan pembangunan. Gerakan pulang mudik mudah-mudahan meningkatkan upaya pemerataan pembangunan. Selamat menikmati kebahagiaan pulang mudik, Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1422 H., mohon maaf lahir dan batin. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kebersamaan, kepedulian, kesejukan, kedamaian dan kemandirian kepada kita sekalian. (*Prof. Dr. Haryono Suyono, Pengamat Masalah Sosial Kemasyarakatan*).

Otonomi Daerah dan Peta Kemiskinan

BKKBN mulai bekerja keras mempersiapkan upaya untuk memperbaharui peta keluarga di seluruh Indonesia. Peta keluarga itu semula dikembangkan untuk membantu keluarga Indonesia mendapatkan dukungan pemerintah, aparatnya dan lembaga-lembaga terkait dalam proses pemberdayaan keluarga. Pemberdayaan awal dimulai dengan bantuan dalam program KB. Selanjutnya di tambah lagi dengan bantuan dalam memperbaiki kualitas anak-anak balita. Makin lama makin luas dan membesar, yaitu bantuan untuk anak remaja, penduduk lansia dan seluruh keluarga.

Peta keluarga itu disusun dari data individual keluarga Indonesia. Pada tahun 2000 yang lalu berhasil dikumpulkan data individual dari hampir 47 juta keluarga yang berasal dari seluruh Indonesia. Dengan data itu disusun peta keluarga, termasuk peta keluarga miskin, dengan segala cirinya yang penting untuk keperluan pembangunan. Dengan berpedoman pada peta itu berbagai instansi dan lembaga masyarakat mengembangkan program-program sesuai kondisi dan pilihan sasaran.

Sayang pemerintah sendiri mempunyai anggaran yang sangat terbatas. Tidak banyak bisa mengembangkan program yang menguntungkan masyarakat. Namun kita patut bersyukur, mulai banyak program dan kegiatan mempergunakan peta yang sama untuk menentukan sasarannya secara tepat.

Sebagai contoh, bantuan untuk penduduk miskin melalui pemberian ‘kartu sehat’ mempergunakan data dan peta tersebut dengan penyempurnaan seperlunya. Bantuan beasiswa GNOTA untuk anak-anak miskin juga mempergunakan peta yang sama dengan penyempurnaan yang baik. Upaya membantu keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I, atau keluarga yang kalau tidak dibantu akan dengan mudah jatuh miskin, menjadi pemakai utama yang berhasil.

BKKBN sendiri, sebagaimana tujuan awalnya mengembangkan peta itu dimasa lalu, mempergunakan peta ini untuk membantu setiap keluarga pasangan usia subur mendapatkan pelayanan KB. Atas dasar data peta itu setiap pasangan mendapatkan informasi, edukasi dan komunikasi. Pelayanan itu diantar ke rumah-rumah pasangan usia subur agar mereka bisa ‘melek KB’. Selanjutnya setiap pasangan subur bisa mengambil keputusan untuk pergi ke klinik KB atau menunggu pelayanan lapangan yang biasanya diantar oleh para bidan bersama petugas lapangan lainnya. Peta itu telah menolong tidak saja ribuan, tetapi jutaan atau bahkan hampir semua pasangan usia subur berupa pelayanan KB yang sangat baik dirumahnya, di RT-nya, di RW-nya atau minimal di desanya.

Biarpun ada yang melontarkan kritik untuk program KB yang berhasil selama ini, dengan peta sasaran yang baik, tidak kurang dari 35 juta keluarga pasangan usia subur telah memperoleh pelayanan informasi dan kontrasepsi dengan teratur. Tidak tanggung tanggung, jutaan ibu-ibu dan bayi yang tidak berdosa telah dapat dibebaskan dari kematian akibat kehamilan yang terlalu sering, terlalu rapat, atau sudah terlalu tua masih juga mengandung dan melahirkan. Karena itu tidak terhitung jumlah suami yang tidak

jadi kehilangan isterinya. Tidak terkirakan lagi anak-anak balita yang tidak jadi kehilangan ibunya karena upaya penyelamatan yang sangat luhur tersebut. Kebahagiaan itu terjadi karena para petugas di lapangan, para ibu-ibu PKK, para alim ulama, dan banyak lagi sukarelawan yang sangat berjasa telah berhasil membuat peta keluarga yang sangat berguna.

Ada juga beberapa instansi yang belum sepakat mempergunakan peta yang sama. Bagi yang belum setuju umumnya mencari kekurangan, bukan kesamaan atau kelebihan peta sasaran tersebut. Akhirnya instansi dan lembaga kemasyarakatan itu membuat peta sendiri yang pasti tidak luput dari kekurangan juga. Alangkah baiknya kalau semua pihak bukan saja bisa memberikan kritik, tetapi mengulurkan tangan dan bekerjasama menyempurnakan data dan peta tersebut untuk dipergunakan bersama sebagai acuan pembangunan. Peta acuan itu dijadikan alat untuk memadukan program dan bantuan.

Bulan depan kegiatan menyempurnakan peta itu dimulai lagi. Alangkah baiknya apabila pemerintah daerah, dalam era otonomi, meluangkan waktu, menyediakan tenaga dan dana tambahan, untuk memperluas cakupan dan meningkatkan mutu pendataan tersebut. Perluasan cakupan itu dapat dilakukan dengan memilih berbagai prioritas yang cocok untuk kepentingan daerah. Bisa untuk memperbaiki pelayanan sosial kemasyarakatan. Bisa untuk mengembangkan peta pembangunan ekonomi kerakyatan yang berwawasan kependudukan, yaitu dengan mengedepankan penduduk sebagai sumber, pelaku dan akhirnya menikmati hasil pembangunan sesuai sumbangannya.

Upaya untuk meningkatkan mutu pendataan itu dapat dilakukan dengan memberi petunjuk yang jelas kepada setiap Kepala Desa, Ketua RW dan Ketua RT untuk memberi bantuan secara jujur dan sewajar-wajarnya. Para petugas dan siapa saja yang secara sukarela membantu mengumpulkan data dari penduduk setempat diharapkan bekerja sama secara jujur. Data yang dikumpulkan benar-benar hasil wawancara yang tidak di rekayasa.

Kejujuran menjawab pertanyaan dan mengisi berbagai kolom dalam daftar pertanyaan sungguh akan meningkatkan mutu data yang dikumpulkan.

Lebih dari itu, apabila para pejabat dan petugasnya di daerah dapat ikut serta secara aktif mengembangkan peta pembangunan itu, diharapkan upaya yang nanti akan direncanakannya mempunyai titik pijak yang nyata dan benar. Upaya itu didasarkan pada data atau kenyataan lapangan yang setiap tahun diperbaharui. Setiap tahun dapat dilihat kemajuannya secara faktual. Pembangunan tidak lagi menjadi sekedar ‘buah bibir’, dan dilaporkan secara kualitatif. Keberhasilannya setiap waktu dapat dinilai dan diukur secara kuantitatif. Selanjutnya keberhasilan atau kekurangan itu dapat disajikan secara transparan.

Membuat Peta Kemiskinan Ketersediaan lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia, IMF, Bank Pembangunan Asia, Pemerintah Amerika, Pemerintah Jepang, serta lembaga-lembaga lain seperti UNICEF, WHO, UNFPA, UNESCO, FAO, US AID, AusAID, dan lainnya, sungguh menggembirakan. Mereka siap membantu mengentaskan

kemiskinan, termasuk ikut mengurangi penderitaan ibu dan anak-anak, mengatasi masalah kekurangan gizi, pelayanan kesehatan dan KB, kekerasan dalam pengertian reproduksi sehat, pendidikan, produksi pangan, dan lainnya patut disambut dengan persiapan yang memadai.

Salah satu persiapan untuk menyambut uluran tangan lembaga-lembaga internasional itu adalah memberikan arah sasaran yang tepat dan tidak tumpang tindih. Untuk memberikan arahan yang tepat itu diperlukan sasaran bersama yang bisa menjadi acuan program terpadu. Tiba waktunya pemerintah daerah, sebagai pemegang otonomi, bekerja keras mengusahakan agar pendataan yang setiap tahun selalu diperbaharui itu bisa menjadi acuan bersama yang bermutu.

Acuan bersama ini bisa dipergunakan untuk meng-koordinasikan program dan kegiatan tanpa harus ikut campur terlalu mendalam pada "tetek bengek" kegiatannya. Acuan bersama berfungsi mengarahkan sasaran secara tepat. Arahan terpadu melalui sasaran itu akan memungkinkan setiap lembaga dengan berbagai program dan kegiatan mengisi sasaran yang sama dengan dukungan bervariasi. Dengan demikian seluruh intervensi program dapat diarahkan secara terpadu bukan karena instruksi Bupati atau Walikota, tetapi karena sasarannya jelas dan sama. Sasaran itu, yang adalah rakyat kita, harus yakin bahwa seluruh dukungan untuk pembangunan itu bisa sampai secara mulus kepadanya. Otonomi Daerah harus bisa dipergunakan oleh Pimpinan yang Visioner untuk maju dengan cepat. Dengan Otonomi Daerah harus bisa meningkatkan dinamika pembangunan dengan merubah orientasi dari pendekatan "PC", yang dulu artinya "Power Centered", kepada orientasi baru, "PC" baru, yang artinya "People Centered". PC baru adalah Pembangunan berbasis Kerakyatan.

Kesempatan emas ini datang tidak secara tiba-tiba. "Emas"-nya sendiri sekarang telah mempunyai kualitas yang dapat dibanggakan. Karena itu dalam empat bulan ini Pemerintah Daerah dengan aparatnya, dalam rangka otonomi yang dinamis, dapat dengan sigap mengambil sikap dan memanfaatkan momentum untuk membuat peta wilayah itu. Peta wilayah itu sekaligus bisa menjadi peta kemiskinan yang hampir pasti akan disambut rakyat banyak dengan antusiasme yang tinggi. Lebih lagi kalau mulai awal tahun 2002, dengan peta kemiskinan yang akurat, segera diikuti dengan program dan upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan penduduk secara sistematis.

Dengan peta kemiskinan yang akurat diharapkan berbagai Instansi, pusat dan daerah, serta lembaga-lembaga donor, dari dalam maupun luar negeri, masyarakat luas, termasuk keluarga dan penduduk miskin sendiri, dapat diajak mengembangkan program pembangunan yang berdimensi ganda.

Minimal dapat dikembangkan program dan kegiatan pembangunan dengan pendekatan tiga dimensi, dimensi manusia, dimensi wilayah dan dimensi usahanya.

Dengan sasaran penduduk, anggota keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I, yang hampir mirip dengan keluarga miskin, dapat diusahakan dukungan terpadu untuk program-program kesehatan, pendidikan dan usaha ekonomi mikro yang memadai. Usaha bidang kesehatan dapat diprioritaskan pada upaya pencegahan seperti imunisasi dan

pengobatan penyakit-penyakit yang umumnya diderita oleh anak-anak bayi atau anak balita. Dukungan untuk pendidikan dapat diarahkan untuk meningkatkan cakupan wajib belajar sembilan tahun, khususnya menggiatkan perluasan cakupan pendidikan sekolah menengah tingkat pertama dan sekolah menengah umum lainnya.

Dukungan untuk usaha ekonomi mikro diarahkan untuk meneruskan berbagai kegiatan yang selama ini telah berhasil merangsang gerakan ekonomi kerakyatan. Dukungan itu diarahkan pada usaha mikro, usaha kecil dan menengah serta gerakan koperasi pada umumnya. Pemberian modal dan bimbingan oleh para pejabat dan tenaga profesional bisa lebih diarahkan pada sasaran dengan lebih tepat, sungguh-sungguh dan berkesinambungan.

Dukungan untuk pengembangan wilayah diarahkan untuk “menghidupkan” wilayah - wilayah terbelakang agar secara ekonomis bisa memberi peluang yang makin besar. Rakyat yang selama ini “terpaksa tidur” karena wilayahnya mati, atau secara ekonomis tidak ada fasilitasnya, harus dibangkitkan semangatnya untuk ikut serta dalam pembangunan yang menjanjikan.

Dengan partisipasi rakyat yang makin tinggi itu, pengembangan wirausaha untuk wilayah dan penduduk pada umumnya akan mempunyai makna yang lebih baik. Dengan demikian pengembangan kewirausahaan tidak harus membuka kesenjangan karena semua pihak ikut serta dalam partisipasi yang proporsional sesuai kemampuan atau pilihannya secara demokratis. Peta wilayah yang akurat akan memberi makna kepada otonomi dengan sentuhan yang mengena hati rakyat banyak. Rakyat harus melihat bahwa otonomi daerah adalah untuk memperbaiki nasib rakyat, melalui kesempatan membangun yang diberikan kepada rakyat. Otonomi bukan sekedar untuk menaikkan pendapatan daerah, atau memberi kesempatan para pejabatnya mendapat honor lebih tinggi, jalan-jalan ke luar negeri atas beban rakyat banyak, atau membangun dengan mengorbankan gaji guru atau karyawan kecil lainnya.

Mudah-mudahan hal-hal yang nampaknya sederhana tetapi sangat strategis dan menyentuh hati nurani rakyat kecil itu mendapat perhatian Ibu Presiden Megawati Soekarnoputri bersama para Menteri, para Gubernur, para Bupati dan Walikota, serta kekuatan pembangunan lainnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita sekalian. (Prof. Dr. Haryono Suyono, Pengamat Masalah Sosial Kemasyarakatan). – Otonomi-Miskin-892001.

KELUARGA INDONESIA MODERN HADAPI TANTANGAN GLOBALISASI

Oleh : Haryono Suyono

Peringatan Hari Keluarga Nasional tahun 2002 ditandai oleh beberapa peristiwa yang sangat penting. Pertama, Badan Pusat Statistik secara resmi mengumumkan hasil akhir Sensus Penduduk Indonesia tahun 2000 dimana secara final ditetapkan angka akhir penduduk Indonesia tahun 2000 adalah 206,3 juta jiwa. Angka final itu jauh lebih rendah dibandingkan ramalan tahun 1970 yang menyatakan bahwa penduduk Indonesia tahun 2000 adalah sekitar 275 juta jiwa.

Yang lebih menggembirakan lagi adalah bahwa pertumbuhan penduduk rata-rata sepuluh tahun terakhir, bukan pertumbuhan penduduk pada tahun 2000, yang dimasa lalu berada diatas 2 persen, dan dalam sepuluh tahun antara 1980-1990 rata-rata tahunnya telah mulai turun menjadi 1,97 persen, telah dapat ditekan lebih lanjut. Dalam sepuluh tahun terakhir, antara tahun 1990-2000 rata-rata tahunannya turun drastis menjadi sebesar 1,49 persen. Penurunan yang sangat drastis dalam sepuluh tahun terakhir ini merupakan indikasi bahwa pertumbuhan penduduk pada tahun 2000 hampir pasti sudah mendekati angka rata-rata sekitar 1,2 – 1,3 persen setiap tahun. Pertumbuhan penduduk rata-rata yang sangat menurun itu menandakan bahwa angka fertilitas sudah turun menjadi sangat rendah karena selama sepuluh tahun ini angka kematian juga sudah menurun dengan cukup tajam. Hampir pasti bahwa penurunan fertilitas yang drastis itu adalah jasa para pelaksana dan pejuang, serta para simpatisan gerakan KB Nasional yang hari ini memperingati Hari Keluarga Nasional di seluruh tanah air.

Disamping itu, BPS mengumumkan bahwa rata-rata penduduk perkotaan sudah melompat mendekati angka 45 persen dari seluruh penduduk di Indonesia. Dengan pelaksanaan otonomi daerah, sesudah Sensus Penduduk, bertambah pula kota-kota baru karena munculnya ibukota kabupaten baru dan bertambahnya kota baru, tidak mustahil angka penduduk perkotaan sekarang ini sudah mendekati angka 50 persen atau lebih.

Dengan fertilitas yang sangat rendah, pertumbuhan penduduk yang sangat rendah dan makin tingginya penduduk perkotaan itu, maka ciri umum keluarga Indonesia adalah keluarga modern dengan ciri demografi yang hampir sempurna dan ciri spatial urban yang berkembang dengan kecepatan tinggi. Lebih-lebih lagi dengan keterbukaan informasi, luasnya pemakaian radio, tv dan media massa lainnya, masyarakat Indonesia harus dianggap sebagai masyarakat modern dan diperlakukan sebagai masyarakat modern dengan pendekatan demokratis dan penghargaan yang tinggi terhadap hak-hak azasi manusia yang memberi penghormatan yang tinggi terhadap harga diri manusianya.

Kedua, untuk keperluan pemeliharaan kesehatan reproduksi yang mantap, oleh masyarakat modern diperlukan pelayanan mandiri yang pilihannya harus dilakukan oleh masyarakat sendiri. Untung para pimpinan program KB sejak tahun 1985 telah berpandangan maju kedepan. Sejak saat itu telah diperkenalkan program KB Perkotaan

yang Mandiri dengan pemberian pelayanan KB oleh para dokter dan bidan swasta di tempat praktek masing-masing. Lebih dari itu kemudian diperkenalkan juga pelayanan kontrasepsi secara mandiri dengan adanya lingkaran biru KB, lingkaran emas KB, dan pelayanan KB swasta lain yang makin marak.

Para pemimpin gerakan KB yang berpandangan luas dan jauh ke depan tidak takut harus berhadapan dengan arus keras yang tidak menghendaki adanya pelayanan yang sangat luas di masyarakat itu karena mereka mendapat dukungan dari para alim ulama yang yakin bahwa pemberdayaan dalam bidang agama dan kebudayaan yang konsisten untuk keluarga Indonesia dimanapun mereka berada akan bisa mengatasi dampak negatif kontrasepsi yang tersedia secara luas itu.

Karena itu secara bersama-sama dibangun dan dikembangkan pelayanan KB dan pemberdayaan keluarga yang bersifat paripurna di seluruh pelosok tanah air, baik yang dikelola pemerintah secara langsung maupun yang bersifat mandiri dikelola oleh masyarakat sendiri. Hasilnya sungguh menggembirakan, pada waktu ini tidak kurang dari 60 – 70 persen pelayanan KB sudah ditangani oleh masyarakat secara mandiri. Pelayanan kesehatan dan pendidikan barangkali juga menempati posisi yang sama.

Ketiga, pengalaman upaya pemberdayaan keluarga di pedesaan secara langsung, biarpun akhir-akhir ini relatif mengendor, telah berjalan hampir sembilan tahun, yaitu mulai tahun 1993/1994 pada saat dimulainya program Inpres Desa Tertinggal (IDT), atau hampir enam tahun sejak diawalinya gerakan menabung Takesra dan pemberian Kredit Kukesra pada tahun 1996. Kedua program di seluruh desa itu telah memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada pemerintah dan rakyat pada umumnya.

Laporan Bank BNI bulan Maret 2002 menggambarkan bahwa kegiatan Takesra dan Kukesra tetap berjalan dengan baik. Jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I atau keluarga miskin yang mempunyai tabungan Takesra pada bulan Februari 2002 adalah 13.099.413 keluarga dengan nilai tabungan sebesar Rp. 213.891.729.347,- (dua ratus tigabelas milyar delapan ratus sembilanpuluh satu juta tujuhatus duapuluh sembilan ribu tigaratus empatpuluh tujuh rupiah).

Para peserta keluarga miskin itu bergabung dalam 631.040 kelompok dan sebagian besar memanfaatkan kredit Kukesra untuk usaha-usaha ekonomi produktif dalam lingkungan kelompok atau desanya masing-masing. Jumlah keluarga yang memanfaatkan kredit Kukesra sampai akhir Februari 2002 adalah sebanyak 10.467.392 keluarga dengan jumlah kredit Kukesra sebesar Rp. 1.741.090.520.000,- (Satu triliun tujuhatus empatpuluh satu milyar sembilanpuluh juta limaratus duapuluh ribu rupiah).

Dana tabungan setiap nasabah itu tersimpan rapi pada Bank BNI dan menjadi bagian dari pemupukan modal untuk para peserta yang telah makin mampu mengambil kredit Kukesra. Dana dari cicilan Kukesra tersebut selanjutnya mulai bulan Juni 2001 lalu akan disediakan untuk membiayai program baru yang tetap dikelola oleh BKKBN dan unit-unitnya, yaitu Program Kukesra Mandiri.

Dicatat pula ribuan keluarga telah dapat berkembang dengan usahanya yang pesat sehingga dianggap lulus dan telah melanjutkan dengan berbagai kegiatan usaha dengan dukungan pembinaan dan kredit yang sifatnya makin mandiri. Tidak sedikit kelompok atau perorangan yang mengikuti gerakan Pundi, Pundi Kencana atau bahkan mengembangkan usaha warung dengan nauangan program Warung Sudara di beberapa wilayah di seluruh Indonesia. Ratusan milyar kredit dengan bunga pasar telah dapat dimanfaatkan oleh keluarga-keluarga yang enam sampai sembilan tahun yang lalu tidak pernah mimpi untuk bisa menjadi nasabah Bank.

Keempat, ditingkat perkotaan, di DKI Jakarta telah mulai diperkenalkan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) yang dianggap oleh banyak kalangan merupakan terobosan jitu yang secara langsung memanfaatkan institusi masyarakat di tingkat kelurahan-kelurahan, yaitu dengan secara langsung mengambil basis masyarakat Rukun Warga (RW) dan masyarakat Rukun Tetangga (RT). Oleh banyak kalangan program itu juga dinilai sebagai sebuah langkah maju dan bijak yang diambil Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menyikapi perubahan-perubahan otonomi. Secara khusus program ini menyikapi Undang-Undang Nomor 34 tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara RI Jakarta, yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2001, dengan membentuk suatu Dewan Kelurahan atau disingkat DK atau Dekel. Dekel ini ditugasi menampung program dan kegiatan yang ada pada tingkat kelurahan.

Pembentukan Dekel di daerah perkotaan itu dimaksudkan untuk menampung aspirasi masyarakat secara langsung. Pembentukan Dekel juga merupakan pertanda kepercayaan dari Pemda DKI Jakarta kepada masyarakat dengan menyerahkan pelaksanaan berbagai kegiatan yang dibiayai lewat APBD DKI Jakarta langsung kepada masyarakat di tingkat RT/RW. Masyarakat diberikan kesempatan untuk merumuskan program dan kegiatan sendiri pada tingkat RT/RW melalui berbagai proposal atau cara-cara lain yang diatur sendiri oleh masyarakat.

Apabila pembentukan Dekel segera diikuti dengan pembentukan Lembaga Keuangan Mikro di tingkat kelurahan atau kecamatan, maka penyaluran dana untuk masyarakat pada tingkat kelurahan itu, khususnya untuk keluarga yang belum biasa berhubungan dengan sistem perbankan, akan menjadi lebih lancar. Dengan belajar secara bertahap maka dikemudian hari mereka dengan mudah akan dapat berhubungan dengan Bank. Apabila keluarga yang sedang tumbuh itu berhubungan dengan Bank, maka untuk kegiatan ekonomi batas jumlah plafond kredit yang dapat dimanfaatkan adalah hampir tidak terbatas.

Tantangan Kedepan

Masyarakat dan keluarga Indonesia yang modern dan maju akan menghadapi tantangan globalisasi yang dinamis jauh lebih berat dibanding dengan masa-masa sebelumnya. Disamping tantangan masyarakat dan keluarga Indonesia juga akan mempunyai kesempatan yang luar biasa besarnya untuk ikut berperan dalam tatanan dunia yang makin terbuka luas hampir tanpa batas.

Di semua negeri penghargaan terhadap harga diri manusia dan demokrasi akan menjadi ciri universal masyarakat dunia, sehingga kesempatan yang terbuka itu juga tidak akan membedakan warna kulit, asal usul maupun dari mana seseorang itu berasal. Demikian juga tantangan dan rintangan seperti halnya narkoba, penyakit memular seperti HIV/AIDS, tidak akan bertanya lagi kepada kita apakah kita pantas menerima penyakit itu apa tidak, sekali serang mereka akan tetap menyerang tanpa ampun.

Karena itu ada tiga hal penting yang harus disiapkan oleh keluarga Indonesia untuk menghadapi tantangan dan menyiapkan diri menerima kesempatan global yang menjanjikan itu : Pertama, daya tahan yang kuat, baik dalam bidang keagamaan, tingkah laku budi pekerti, ketebalan rasa kebangsaan serta keakraban dalam keluarga. Daya tahan ini diperlukan untuk tetap dapat berpijak pada akar pondasi yang kokoh dalam mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tanah air dan bangsanya.

Kedua, kesehatan dan kemampuan intelektual yang prima. Kesehatan dan kemampuan intelektual itu diperlukan untuk menjadi manusia tangguh yang sanggup bersaing dengan bangsa-bangsa lain yang mempunyai persiapan mental, spiritual, kesehatan pribadi dan ilmu pengetahuan teknologi yang sangat tinggi.

Bangsa kita perlu dipersiapkan tingkat kesehatannya sejak dini agar dalam usia yang produktif mampu memberikan nilai produk yang tinggi dan tidak terganggu dengan berbagai penyakit yang relatif baru muncul pada usia-usia yang sangat produktif. Demikian juga manusia Indonesia perlu dipersiapkan dengan sekolah-sekolah bermutu yang jauh lebih baik dibandingkan keadaannya sekarang karena harus mampu bersaing dengan tenaga yang dipersiapkan dengan tangguh di negara masing-masing.

Pikiran-pikiran sempit bahwa kita mempunyai tanah air yang subur makmur dan pasti cukup untuk kita sendiri sekarang saja sudah tidak bisa kita kelola sendiri. Banyak usaha-usaha dengan nilai tambah tinggi di tanah air kita ini sekarang banyak di kelola oleh tenaga-tenaga asing yang bekerja di tanah air kita. Dengan sifat keterbukaan dunia yang hampir tanpa batas, kita di tanah air sendiripun harus bersaing dengan saudara-saudara lain yang berasal dari banyak negara.

Ketiga, kita harus mampu mengembangkan fungsi dan kemampuan ekonomi keluarga Indonesia. Kemampuan fungsi ekonomi keluarga harus dikembangkan semenjak saat yang sangat dini agar membudaya dalam seluruh kehidupan keluarga di masa depan. Setiap anak semenjak dini harus mampu membedakan nilai-nilai ekonomi seperti efisiensi dalam belajar, berlatih dengan mainan-mainan yang canggih dan merangsang perkembangan otak untuk mencipta dan mengembangkan gagasan-gagasan yang mempunyai nilai tambah secara ekonomis.

Disamping itu kita menghadapi maraknya otonomi daerah yang mau tidak mau harus dengan bijaksana ditanggapi dalam kerangka pembangunan keluarga dengan ciri-ciri yang berbeda-beda dari suatu daerah dengan daerah lainnya. Namun demikian harus tetap diperhatikan bahwa justru perbedaan itu menjadi kekuatan pemersatu bangsa.

Kemampuan berfikir dan berbuat secara ekonomis dalam alam yang berbeda-beda itu harus tetap diperlihara dalam kerangka keluarga yang tetap akrab dengan toleransi dan gotong royong yang menjadi ciri utama bangsa Indonesia yang sangat kita banggakan, sekaligus tetap dalam kerangka negara kesatuan yang damai dan sejahtera. Dengan persiapan-persiapan dan pengertian itu tidak ada waktunya bagi para pelaksana program untuk beristirahat. Kita harus tetap bekerja keras membangun keluarga secara holistik dan berkelanjutan. Selamat memperingati Hari Keluarga Nasional. (*Prof. Dr. Haryono Suyono, Pengamat Masalah Sosial Kemasyarakatan*)-*Harganas2002-2962002*.

PEMBERDAYAAN PENGUNGSIS UNTUK PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

Kalau benar perkiraan jumlah pengungsi Indonesia karena berbagai kerusuhan akhir-akhir ini telah mencapai *1,25 – 1,35 juta jiwa*, maka *hampir pasti* sekitar *700.000 - 800.000 jiwa* adalah *anak-anak dibawah usia 15 tahun*, sekitar *125.000 jiwa* adalah *penduduk lanjut usia* yang kebanyakan adalah perempuan, sekitar *250.000 – 300.000 orang* adalah *Ibu-ibu*, baik dengan anaknya atau tidak, dan sisanya adalah para bapak usia produktif. Dalam memperingati *Hari Anak Nasional 23 Juli 2001* ada baiknya menaruh perhatian dan meningkatkan usaha menolong para pengungsi yang kebanyakan anak-anak yang menderita tersebut. Mengungsi bukan salah mereka. Anak-anak tersebut mempunyai hak yang sama untuk masa depan yang cerah seperti halnya anak-anak Indonesia lainnya.

Bangsa kita memang masih selalu dirundung malang, penjajahan yang panjang, pembangunan yang belum berhasil, keluarga dan penduduk yang kualitasnya rendah, ditambah dengan adanya krisis multidimensi yang tidak berkesudahan, dari *sekitar 47 juta keluarga Indonesia* yang dicatat pada akhir tahun 2000 yang lalu, ada sekitar *47 – 52 persen* berada dalam kondisi pra sejahtera dan sejahtera I, yaitu kondisi tidak selalu miskin tetapi dengan goncangan sedikit saja dengan mudah keluarga-keluarga semacam itu bisa jatuh dibawah garis kemiskinan.

Karena kemiskinan banyak penduduk dan atau keluarga *“mengungsi”* mencari tempat lain mencoba keberuntungannya yang lebih baik. Walaupun usaha itu dihantui ketakutan dan ketidakpastian yang luar biasa, dan tidak menentu masa depannya, tetapi pengalaman yang tidak tertahankan memaksa mereka memberanikan diri mengadu untung, mencari kerja apa saja, di tempat lain.

Jenis *pengungsi kedua* adalah mereka yang karena keadaan terpaksa pindah ketempat yang lebih aman. Karena kehidupan yang miskin banyak keluarga terpaksa tinggal menetap *didaerah-daerah* yang *rawan bencana alam* seperti didaerah gunung berapi yang masih aktif, didaerah lereng gunung atau tanah terjal yang rawan longsor, daerah rawan banjir dan sebagainya. Tempat-tempat semacam ini relatif murah, walaupun mengandung banyak resiko. Keluarga miskin yang rawan bencana itu biasanya tidak berdaya untuk memilih tempat lain yang lebih baik karena kemampuan sosial ekonominya yang sangat terbatas.

Penyelesaian pengungsi karena bencana alam tersebut relatif mudah diselesaikan karena *keluarga yang mengungsi sifatnya sementara* dan umumnya segera kembali ke tempat asalnya begitu bahaya bencana alam berakhir. Umumnya mereka tidak menjadi jera walaupun segala pendapatan dan kehidupannya terganggu karena bencana alam yang berulang-ulang.

Jenis *pengungsi ketiga* adalah karena adanya konflik, gejolak sosial, politik dan budaya. Karena gejolak itu sebagian penduduk dan keluarga *'terpaksa mengungsi'* ke daerah-daerah lain, misalnya ada kerusuhan di Timor Timur, Aceh, Maluku, Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah. Keluarga di daerah gejolak itu terpaksa mengungsi. *Para pengungsi* dengan latar belakang seperti ini biasanya terpaksa mengungsi ke tempat-tempat yang tersebar secara luas di seluruh Indonesia atau bahkan ada yang mengungsi ke luar negeri. Ada pengungsi keluarga Maluku di Sulut, Sulsel, Jawa, dan daerah-daerah lainnya. Ada pengungsi keluarga Sulteng di Sulut, Sulsel, Jawa dan daerah-daerah lainnya. Ada keluarga Aceh mengungsi di Sumut dan daerah-daerah lainnya. *Para pengungsi* dengan alasan semacam ini umumnya *sukar kembali* ketempat asalnya dan harus mendapat perhatian dan penanganan yang lebih komprehensif.

Dalam hal mengungsi karena persoalan-persoalan kerusuhan alasan suku, agama dan teror yang akhir-akhir ini terjadi di tanah air, para pengungsi mempunyai sikap yang beraneka ragam terhadap upaya pemulangan atau pengembalian mereka ke tempat asalnya. Usaha untuk mengembalikan para pengungsi ketempat asalnya itu tidak mudah. Ada sebagian yang trauma atas peristiwa yang terjadi di tempat asalnya, dan ada pula yang tidak yakin bahwa keadaan di tempat asalnya sudah lebih baik dibandingkan dengan keadaan pada waktu mereka tinggalkan. Karena adanya trauma itu sebagian lainnya lebih senang tetap tinggal di tempatnya yang baru yang mereka rasakan lebih kondusif. Ada kalanya sebagian lagi ingin kembali karena di tempatnya yang baru mengalami lebih banyak penderitaan, namun tidak berani mengambil keputusan untuk kembali karena tidak yakin akan keadaan di tempat asalnya.

Karena itu, untuk memberikan bantuan kepada para pengungsi semacam ini, terutama untuk para pengungsi yang terkena limbah persoalan-persoalan aktual dewasa ini, semua persoalan itu harus diselesaikan dengan pendekatan sosial kemasyarakatan, budaya dan kemanusiaan yang komprehensif dan tepat, sekaligus disertai upaya yang kuat untuk mempertahankan rasa persatuan dan kesatuan bangsa yang berjangka panjang dan lestari. Pendekatan yang tidak tepat dan tidak menyeluruh justru bisa menyulut dan menimbulkan ketidakpastian serta rasa benci yang tidak berkesudahan.

Latar belakang atau sebab-sebab penduduk atau keluarga itu mengungsi harus diselidiki secara seksama. Penduduk harus dilihat sebagai bagian dari keluarganya, masyarakatnya, dan lingkungan sosial budaya yang lebih luas agar ciri-ciri masyarakat yang melekat itu bisa diarahkan untuk memberi dukungan dan bantuan upaya penyelesaian yang akan dilakukan. Karena itu para pengungsi harus diperhatikan dari berbagai sudut sosial budayanya, suku, agama dan hubungan-hubungan keterkaitan yang ada dalam lingkungannya. *Pendekatan kemanusiaan, pemeliharaan persatuan dan kesatuan bangsa* harus ditonjolkan sebagai *'presentasi'* atau *'positioning'* yang utama.

Penelitian terhadap para pengungsi dengan latar belakang sosial budayanya tersebut harus dilakukan secara obyektif. Para pengungsi tidak boleh dipaksa menjawab pertanyaan sesuai dengan kemauan peneliti atau tekanan segala macam kekuatan lainnya. Dalam menjawab pertanyaan, para pengungsi harus bisa memberikan jawaban yang mencerminkan sikap, tingkah laku dan harapan para pengungsi sendiri secara mandiri,

maksimum dalam konteks lingkungan yang dianggapnya memberikan dukungan ketentraman.

Pendekatan sosial budaya itu harus dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat dan keluarga pengungsi sendiri secara jujur dan penuh kemanusiaan dalam suasana yang kondusif. Kalau dilakukan dengan tergesa-gesa seperti mengejar target, maka tidak akan diperoleh informasi yang jujur dan bertanggung jawab. Pengikutsertaan para sosiolog, antropolog dan psycholog yang bekerja sama dengan keluarga dan masyarakat pengungsi barangkali dapat menolong mendapatkan informasi dan keinginan yang jujur dari para pengungsi maupun lembaga-lembaga yang mendukungnya.

Pendekatan sosial budaya harus sekaligus diarahkan untuk mengajak seluruh pengungsi dan aparat yang mendukungnya, termasuk juga mengajak aparat atau lingkungan yang tidak mendukung, untuk ikut terlibat dalam proses penentuan pilihan oleh para pengungsi. Apabila telah timbul suatu konsensus dengan segala resikonya, maka pihak pemberi dukungan dapat mengarahkan program dukungan untuk mereka yang ragu-ragu atau tidak kuat bergerak atau tidak mampu mengambil keputusan secara mandiri. Mereka harus diberikan dukungan pemberdayaan secara khusus dan berkelanjutan sampai mereka mampu mengambil keputusan secara mandiri.

Selanjutnya dilakukan langkah-langkah secara konsisten sebagai berikut :

Pertama, dilakukan penelitian yang komprehensif. Kegiatan ini merupakan kegiatan sangat penting untuk menjajagi pilihan yang jujur dari para pengungsi dan sekaligus untuk membantu menyiapkan para pengungsi;

Kedua, apabila sudah mulai diketahui keinginan dan kebutuhan bantuan dalam proses penyelesaian yang dikehendaki dengan mantap oleh pengungsi, atau dalam pengertian nilai sosial budaya yang dapat dianggap mantap, segera dapat dilakukan ***pembicaraan dan pembuatan rancangan bersama*** dalam bentuk ***program operasional*** dengan ***tahapan-tahapan*** yang jelas;

Ketiga, dilakukan sosialisasi dan advokasi yang gencar dengan ***komitmen politik yang sangat tinggi***. Program dan kegiatan advokasi itu bukan saja untuk para pengungsi tetapi juga untuk mereka yang mungkin tidak ada hubungannya dengan pengungsi tetapi bisa menjadi kritis dan ikut mempengaruhi opini publik. Secara khusus para pengungsi harus tetap dipupuk keyakinannya atas pilihannya sehingga terangsang untuk ikut mengembangkan institusi dilingkungannya sendiri yang segera bergerak menyelesaikan apa yang mereka cita-citakan.

Keempat, program advokasi itu harus segera diikuti dengan ***program-program operasional*** dengan ***visi yang jelas*** serta didukung komitmen politik dan anggaran yang kuat. Dukungan itu harus diwujudkan dalam bentuk ***penyediaan SDM Pelaksana yang berkualitas*** disertai dengan ***anggaran yang cukup***, agar proses penyelesaian itu dapat dilakukan dengan baik.

Kelima, pemberdayaan para pengungsi yang ingin kembali ke tempat asalnya. Mereka ini bisa kembali sebagai suatu keluarga, orang tua dengan anak-anaknya, atau sebagai perorangan. Mereka dipersiapkan melalui program pemberdayaan serta diberi bekal ketabahan mental spiritual. Mereka harus menjadi manusia dan keluarga baru yang tahan banting karena bisa saja di tempat barunya nanti, yang sesungguhnya tempat aslinya, menghadapi tekanan dari kelompok lain atau dari mereka yang semula tidak mengungsi.

Keenam, pemberdayaan masyarakat dan keluarga penerima pengungsi yang kembali. Keluarga-keluarga yang mungkin tadinya tidak mengungsi harus disiapkan untuk menerima kembali keluarga yang tadinya hilang mengungsi. Mereka harus menjadi bagian dari gerakan pengembalian pengungsi. Mereka harus disiapkan ikut dengan penuh simpati memberi dukungan sosial budaya dan ekonomi yang diperlukan. Karena itu mereka harus diberikan bekal latihan dan dukungan kemampuan ekonomi yang bisa dibagi (*sharing*) dengan keluarga yang baru kembali.

Ketujuh, proses pelaksanaan operasional itu harus diikuti secara terus menerus dengan dukungan komunikasi informasi dan edukasi yang berkelanjutan agar secara otomatis menggerakkan program dan kegiatan lanjutan, suatu gerakan “*snow ball*” yang kuat dan mandiri serta dapat makin mengarahkan kemantapan terhadap pilihan para pengungsi dan masyarakat penerima. Pelaksanaan putusan demokratis yang tepat sasaran harus dipandang oleh setiap pengungsi sebagai kepuasan dan kebanggaan tersendiri.

Kedelapan, kepada keluarga pengungsi yang tidak mau kembali. Mereka harus segera dipindahkan dari “*barak pengungsi*” dan segera *diintegrasikan* kedalam *masyarakat setempat* atau *masyarakat lain yang menjadi pilihannya*. Para pengungsi harus dibekali pemberdayaan. ***Keluarga penerima*** pengungsi dan masyarakat yang menerima mereka kembali ke masyarakat ***harus pula dibantu dengan proses pemberdayaan***. Pendekatan terpadu itu harus dilakukan agar tidak menimbulkan kecemburuan. Kalau pengungsi dibantu, maka penduduk dan keluarga setempat harus mendapat bantuan secara proporsional. Dengan demikian para pengungsi yang kembali, atau yang menetap, atau penduduk setempat yang membantu, tetap akan merasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya seluruh kekuatan pembangunan dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa dalam dinamika yang penuh dengan kebersamaan.

Dengan pendekatan kemanusiaan dan upaya yang sungguh-sungguh memelihara persatuan dan kesatuan bangsa itu kiranya anak-anak pengungsi yang masih berusia muda itu akan mengenang upaya bangsa yang penuh keberadaban dan solidaritas yang kental itu sebagai penggalang yang kuat untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. (*Prof. Dr. Haryono Suyono, Pengamat Masalah Sosial Kemasyarakatan*).

HADIAH KHUSUS DARI BKKBN

Oleh : Haryono Suyono

Para pelaksana dan simpatisan Gerakan KB dan Pemberdayaan Keluarga Nasional dari seluruh Indonesia mengadakan Program Review 2002 di Jakarta. Ditengah acara menilai keberhasilan dan kekurangan kegiatan KB itu, Ibu Kepala BKKBN Prof. Dr. Yaumil C. Agoes Achir menyerahkan penghargaan Pemerintah berupa bintang dan piagam Wira Karya dan Manggala Karya Kencana kepada para Bupati dan Walikota dari beberapa daerah.

Upacara itu adalah penghargaan atas kegiatan daerah-daerah yang ternyata dalam keadaan penduduk Indonesia mencapai jumlah sekitar 211 – 212 juta jiwa dewasa ini, beberapa daerah yang diwakili oleh Bupati dan Walikota itu, berbeda dengan tanggapan keliru bahwa program KB perlu diakhiri dan dananya diserahkan untuk bidang pendidikan, telah menempatkan program KB dan pemberdayaan keluarga sebagai salah satu titik sentral pembangunan di daerahnya.

Penghargaan yang diterima para Bupati dan Walikota itu adalah penghargaan untuk para pelaksana dan simpatisan Gerakan KB dan Pemberdayaan Keluarga Nasional yang ada di daerahnya, dan untuk itu para pelaksana dan keluarga yang berbahagia boleh bangga karena jalan menuju kearah kebahagiaan dan kesejahteraan, dengan adanya program KB yang berhasil di daerah itu, makin tertata secara lebih nyaman.

Masyarakat tentu lebih merasa bahagia dan sejahtera bukan karena tingkat fertilitas secara nasional telah turun dari keadaan masa lalu, tetapi dirinya sendiri, yaitu setiap keluarga bisa merasakan bahwa dengan adanya program KB yang melayani dirinya dengan baik, sebagai suatu keluarga yang tadinya tidak mengetahui apapun juga tentang program ini, sekarang bisa mengambil manfaat sebaik-baiknya. Kebahagiaan pribadi inilah yang kiranya jarang muncul ke permukaan karena setiap rakyat jelata yang beruntung biasanya bukan masuk dalam tatanan berita nasional, tetapi diam dan tenang saja sebagai bagian dari mayoritas diam yang jumlahnya jutaan keluarga.

Yang kemudian menambah semarak dalam acara Program Review itu adalah upacara selesainya persiapan proyek *Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga* atau *Siduga* yang selama beberapa tahun ini dikerjakan bersama oleh perusahaan raksasa dunia IBM dari Amerika Serikat, dengan pihak pemerintah Indonesia, BKKBN.

Proyek Siduga lahir sekitar tahun 1993 dari kenyataan adanya tuntutan dari para keluarga yang telah berjuang dengan baik selama lebih dari duapuluh tahun. Keluarga-keluarga itu, yang dengan sangat tekun telah mengikuti keluarga berencana dan ingin sekali mengembangkan keluarganya dari kondisi keluarga yang makin mengecil jumlah anggotanya menjadi keluarga yang berkualitas, keluarga yang bahagia dan sejahtera. Jajaran BKKBN pada waktu itu hanya mempunyai data yang sangat terbatas tentang keadaan keluarga dengan ciri-cirinya sebagai sasaran program KB, yaitu membantu

menjadi peserta KB dengan mempergunakan salah satu kontrasepsi. Pengetahuan yang ada pada jajaran BKKBN terbatas pada keluarga sebagai pasangan usia subur saja.

Padahal, pemerintah ingin memfasilitasi dan membantu setiap keluarga melakukan usaha pemberdayaan lebih lanjut untuk menjadikannya keluarga yang bahagia dan sejahtera. Untuk itu diperlukan data mikro yang lebih luas dan lebih cermat agar BKKBN, Kantor Menteri Kependudukan dan jajaran pembangunan lainnya pada waktu itu bisa memadukan usahanya untuk membantu pemberdayaan keluarga dengan menempatkan penduduk dan keluarga kurang mampu sebagai titik sentral pembangunan.

Pada sekitar tahun 1993 itu, kemanapun kita mencari, tidak didapatkan data yang bersifat mikro tentang keluarga, khususnya lagi tentang keadaan dan ciri-ciri keluarga kurang mampu yang ada di Indonesia. Dengan adanya kebutuhan yang demikian mendesak, akhirnya pemerintah memutuskan untuk memberi kesempatan kepada Kantor Menteri Kependudukan dan BKKBN mengembangkan suatu pendataan keluarga yang bersifat lengkap dan menyeluruh. Pendataan lengkap yang pertama dimulai pada tahun 1994, yang sekaligus menjadi awal dari gerakan nasional untuk mengembangkan informasi yang lengkap dan bersifat individual tentang keluarga dan penduduk.

Dalam suasana kebutuhan yang mendesak itu, pada saat yang bersamaan diadakan pula gerakan pemberdayaan keluarga miskin yang dimulai di desa-desa miskin dengan proyek besar yang terkenal dengan nama Proyek IDT, atau Inpres Desa Tertinggal. Di desa-desa lain, yang dianggap desa tidak tertinggal, dimulai pula gerakan pemberdayaan keluarga yang dipercayakan kepada BKKBN dan Kantor Menteri Negara Kependudukan dan jajaran lembaga pembangunan lainnya.

Pendataan keluarga yang dilakukan di seluruh Indonesia itu adalah awal dari gerakan dengan sasaran yang jelas, yaitu keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I atau keluarga-keluarga yang mungkin saja tidak miskin, tetapi dengan sedikit goncangan saja bisa dengan mudah jatuh miskin. Pada saat itulah dirumuskan Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga atau Siduga yang segera dikembangkan secara nasional. Pada saat yang bersamaan diusahakan dana untuk mendukung pengembangan sistem itu sebagai upaya yang sifatnya menyeluruh dan terpadu.

Syukur ahlhmdullilah, pemerintah yang mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengentaskan kemiskinan dan membantu pemberdayaan keluarga dengan menempatkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan menganggap bahwa pengetahuan yang luas tentang data kependudukan yang bersifat mikro dengan ciri-cirinya itu dianggap penting dan segera menyediakan dana, termasuk bantuan luar negeri, yang dianggap memadai. Keputusan itu menghasilkan sistem Siduga yang handal dan siap beroperasi. Siduga akan mampu menghubungkan antar instansi pemerintah, pemerintah dengan masyarakat dan keluarga yang berkepentingan. Kiranya lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat dengan program pemberdayaan keluarga yang berkelanjutan dapat mempergunakan Siduga untuk mengembangkan dan memadukan pembangunan dengan menempatkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan. (*Prof. Dr. Haryono Suyono, Pakar Sosial Kemasyarakatan*)-Pengantar-BKKBN-2392002.

MODEL BKKBN DALAM OTONOMI DAERAH

Baru-baru ini muncul kontroversi yang semula dilempar oleh Wakil Presiden RI Bapak Hamzah Haz, yaitu agar BKKBN dibubarkan saja dan anggarannya diserahkan untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Gagasan itu segera dibantah oleh Ketua Forum Parlemen untuk Masalah Kependudukan, dr. Surya Chandra Surapati, PhD., dengan menyatakan bahwa sesungguhnya dengan jumlah kelahiran anak yang relatif makin kecil setiap keluarga makin mampu menyekolahkan anak-anaknya menjadi anak yang pintar.

Memang benar, selama tigapuluh tahun terakhir ini angka kelahiran di Indonesia telah dapat diturunkan lebih dari 60 persen, sehingga ukuran angka kelahiran, yang disebut *Total Fertility Rate*, yang semula besarnya adalah hampir 6 anak setiap keluarga, telah dapat diturunkan menjadi sekitar 2,75 anak setiap keluarga dan terus menurun. Itu semua adalah hasil program yang sangat gemilang dan mendapat banyak pujian dunia, bahkan sampai-sampai banyak kepala negara maupun para pejabat dunia belajar bagaimana mengembangkan program yang demikian efektifnya.

Biaya yang dikeluarkan keluarga untuk alat kontrasepsi relatif sangat kecil dibandingkan keuntungan yang diperoleh oleh para peserta KB. Kurang lebih 50 – 60 persen peserta KB sekarang telah membeli alat kontrasepsinya sendiri di toko obat atau pergi ke tempat dokter praktek swasta. Biaya yang masih dikeluarkan pemerintah adalah seperti halnya biaya subsidi beras untuk orang miskin, semata-mata memberi subsidi kepada keluarga kurang mampu dengan alat kontrasepsi sederhana yang harganya jauh lebih rendah dibandingkan dengan subsidi yang mestinya dibayar pemerintah untuk keperluan lainnya kalau mereka tidak ber-KB dengan baik.

Dalam hal ini BKKBN telah berhasil pula membuat peta keluarga Indonesia dalam tataran data mikro yang tidak ada duanya di seluruh Indonesia. Data mikro itu dipergunakan oleh banyak instansi untuk antara lain memberikan subsidi di bidang kesehatan dengan pemberian kartu sehat untuk keluarga kurang mampu, subsidi beras murah untuk keluarga miskin, dan lain sebagainya.

Dalam rangka otonomi daerah, waktu ini beberapa daerah sedang mengambil langkah konkrit mengambil BKKBN secara lengkap menjadi aparatnya di daerah Kabupaten atau Kota masing-masing. Salah satu model untuk itu sedang dipersiapkan oleh Kabupaten Gunung Kidul dengan sangat baik. Kabupaten ini merencanakan suatu Perda dimana BKKBN akan dijadikan Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana yang utuh, lengkap dengan aparatnya yang sekarang ada di setiap desa.

Lebih dari perencanaan Perda itu Bupati Gunung Kidul yang merasakan keberhasilan gerakan KB yang sangat menolong daerahnya membangun keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera telah merencanakan dan mempergunakan strategi yang jitu untuk melanjutkan keberhasilan pembangunan keluarga sejahtera tersebut. Untuk itu dalam setiap kesempatan, dengan mempergunakan data hasil pendataan yang dilakukan oleh BKKBN setempat, Bupati yang mengetahui bahwa daerahnya mempunyai sekitar 82.614 keluarga miskin dan miskin sekali itu menginginkan agar dalam tahun 2002 ini

minimal 10.000 keluarga dapat dientaskan. Bupati dan jajarannya yakin bahwa upaya ini akan dapat diselesaikan oleh seluruh aparatnya secara terpadu bersama masyarakatnya. Keyakinan ini didasarkan pada data yang telah dikumpulkan secara lengkap oleh BKKBN dan aparatnya sampai ke pelosok pedesaan. Bupati yakin apa yang harus dikerjakan karena ada data lengkap dengan alasan kenapa sebuah keluarga itu dianggap miskin atau miskin sekali.

Dengan data yang lengkap itu dalam setiap Pertemuan Forum Koordinasi Pembangunan dan Tim Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, yang diadakan setiap tanggal 17, Bupati dapat mengkoordinasikan seluruh jajaran dinas untuk bahu membahu menangani sasaran yang sama dan menjadi acuan pembangunan terpadu itu. Dengan keterpaduan itu gagasan pembangunan disosialisasi oleh Bupati dan aparatnya secara intensif. Dalam setiap kesempatan bertemu dalam rapat-rapat Badan Perwakilan Desa maupun pertemuan organisasi sosial kemasyarakatan, gagasan pembangunan terpadu itu selalu menjadi topik bahasan yang hangat. Begitu juga dalam pertemuan dengan para ibu dalam gerakan PKK tidak lupa diminta juga partisipasi kaum ibu dan para wanita pada umumnya untuk mensukseskan pembangunan keluarga tersebut, karena akhirnya tanpa partisipasi para ibu pembangunan itu akan sia-sia belaka.

Tekad Bupati dalam mengatasi keluarga miskin dan miskin sekali dibuktikan dengan antara lain bahwa dalam Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun 2002 untuk intervensi keluarga miskin dan miskin sekali dialokasikan anggaran tambahan tidak kurang dari Rp. 2 milyar. Bahkan untuk membantu keluarga miskin yang anaknya masih sekolah diberikan bantuan bebas biaya SPP.

Dengan mengembangkan kerjasama antara BKKBN dan Dinas-dinas lainnya Bupati berhasil membagi tugas antar instansi dengan sangat baik. Sebagai contoh untuk membantu menyelesaikan kemiskinan sekitar 10.000 keluarga di tahun 2002 ini Dinas Sosial mendapat bagian membantu program lantainisasi, fertisasi, dan kebersihan lingkungan termasuk menyediakan sarana kakus dan mandi cuci yang bagi keluarga miskin di Gunung Kidul biasanya sangat tidak memenuhi syarat. Dinas ini juga kebagian tugas untuk mengusahakan agar anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa bersekolah dengan tenang dan mendapat bantuan sekedarnya. Dengan data dari BKKBN itu juga, Bupati bisa menugaskan kepada Dinas Kesehatan untuk memberikan bantuan pengobatan gratis kepada keluarga miskin dan keluarga miskin sekali itu.

BKKBN sendiri mendapat tugas menyediakan data dengan ciri yang lengkap dan memberikan bantuan lantainisasi, jaminan bahwa alat kontrasepsinya tersedia dengan baik dan tidak terlambat, serta menyalurkan beasiswa dari Yayasan Damandiri maupun dari Yayasan Supersemar untuk keluarga kurang mampu. Disini BKKBN membantu Bupati mempermudah usahanya untuk mengentaskan keluarga miskin dan anak-anaknya untuk makin sejahtera. *(Prof. Dr. Haryono Suyono, Pengamat Masalah Sosial Kemasyarakatan)-Pengantar-BKKBN-992002*

ERA OTONOMI DAERAH BKKBN HARUS PANDAI “MENJUAL” PROGRAM

BKKBN yang hampir enam bulan bekerja tanpa pimpinan definitip, akhirnya Pada 21 Desember 2001 memperoleh pimpinan baru dengan dilantiknya *Ibu Prof. Dr. Yaumil C.*

Agoes Achir sebagai Kepala BKKBN. Pelantikan itu dilakukan satu hari sebelum Peringatan Hari Ibu 2001 dan bertepatan dengan suasana Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1422 H. Peristiwa itu memberi harapan dilanjutkannya upaya besar pemberdayaan keluarga yang sangat didambakan masyarakat luas. Peristiwa itu diharapkan menjadi awal dari kerja keras mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera dalam suasana penuh kedamaian dan kesejahteraan.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, atau terkenal dengan singkatan BKKBN, adalah suatu lembaga pemerintah non departemen, yang selama tigapuluh tahun terakhir ini mengkoordinasikan upaya besar membangun norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera dengan hasil yang sangat positif. Tingkat kelahiran telah menurun lebih limapuluh persen, yaitu dari sekitar 6 (enam) anak setiap keluarga, menjadi hanya kurang dari 2,5 (dua setengah) anak setiap keluarga. Tingkat kematian, terutama tingkat kematian bayi, anak dan remaja telah turun dengan drastis. Akibatnya tingkat pertumbuhan penduduk yang meroket di tahun 1970-an diatas angka 2,5 persen, telah diturunkan menjadi sekitar 1,2 persen, bahkan di beberapa propinsi telah dapat diturunkan dibawah angka 1 (satu) persen.

Dengan bekal mengecilnya jumlah anggota dari setiap keluarga itu, peranan keluarga yang semula seakan-akan hanya terbatas sebagai ‘*pabrik anak*’, dengan *target produksi anak* sebanyak-banyaknya, mulai dituntut menghasilkan, memberdayakan dan memelihara anak dengan kualitas yang handal, tahan banting dan nantinya bisa berumur panjang. Anak-anak itu bukan saja harus sehat jasmani, tetapi harus mempunyai iman dan taqwa yang tinggi, dipersiapkan dengan baik agar mempunyai kemampuan intelektual yang handal, cinta tanah air dan bangsanya, mampu menjadi penggerak pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, serta sanggup menjaga kelestarian dan dinamika lingkungan sekitarnya.

Agar peranan besar yang bakal datang itu dapat dilakukan oleh setiap keluarga Indonesia, telah dikembangkan komitmen melalui *UU* nomor *10* tahun *1992* yang lebih lanjut diterjemahkan dalam *Peraturan Pemerintah* nomor *21* tahun *1994* yang secara terperinci menempatkan *keluarga* sebagai *agen pelaku pembangunan* dengan kesempurnaan *delapan* fungsinya, yaitu *fungsi keagamaan, fungsi budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi pemeliharaan lingkungan.*

Pada tahun 1970-an, dimulai pengembangan keluarga melalui *pendekatan kesehatan*. Tahapan itu adalah awal dari *tahap jangka pendek* yang dilanjutkan dengan *tahap jangka menengah dan tahap jangka panjang* sebagai berikut :

- **Tahap Awal** : Pendekatan Tradisional dan Kesehatan
- **Program Jangka Pendek** - 5 – 10 tahun :
 - Pendekatan KB melalui bidang Kesehatan
 - Pendekatan KB melalui pembangunan dengan pembinaan terpadu
 - Pendekatan KB Terpadu dengan tanggung jawab bersama dari berbagai instansi terkait lainnya
- **Program Jangka Menengah** – 10 – 25 tahun :
 - Pendekatan KB Desa Terpadu
 - Pendekatan KB dan Pembangunan Kemasyarakatan Terpadu
- **Program Jangka Panjang** – 25 tahun keatas :
 - Pembangunan Keluarga Sejahtera

Pola itu fokusnya dikembangkan secara dinamis sebagai upaya pembangunan keluarga sejahtera dengan pilihan sasaran yang tepat dan pemberdayaan terpadu yang holistik. **Pertama**, untuk **keluarga muda** dengan isteri yang berusia antara 20 – 35 tahun. Keluarga muda golongan ini adalah keluarga potensial yang harus mendapat dukungan pemberdayaan husus karena mereka merupakan keluarga potensial yang harus bekerja keras. Kepada setiap keluarga harus dianjurkan agar suami isteri bisa bekerja penuh. Karena kedua pasangan harus bekerja, apabila salah satu kurang mampu, harus memperoleh kesempatan untuk menambah kemampuannya. Anak-anak muda itu harus bisa mengikuti kursus-kursus ketrampilan tambahan yang diperlukan agar setiap orang, pada usia produktif itu, mampu bersaing dan bisa bekerja.

Orang tua atau kakek nenek dari keluarga kelompok ini, kalau sama-sama tinggal sekampung, harus sanggup mengembangkan kegiatan kemasyarakatan yang mendukung sosialisasi anak-anak balita, atau cucu-cucu mereka, yang umumnya belum mempunyai saudara dalam lingkungan keluarganya. Anak balita keluarga itu agar bisa bermain dengan anak balita lain dalam lingkungan yang sama. Kelompok bermain dalam masyarakat itu bisa menjadi lembaga yang sekaligus mempererat tali silaturahmi antar keluarga dalam masyarakat dengan penduduk muda dan anak-anak balitanya. Dengan demikian para lansia mempunyai peranan yang dinamis.

Disamping itu keluarga kelompok ini harus pandai-pandai memelihara kesehatan dan kemampuan perlindungan keluarganya dari kesibukan yang luar biasa. Kelompok keluarga ini harus mendapat akses yang tinggi terhadap pelayanan KB, terutama pelayanan secara mandiri karena anggota keluarga itu bekerja dan hanya mempunyai waktu yang terbatas untuk mendapatkan pelayanan KB. Diperlukan juga pelayanan kesehatan prima untuk dirinya agar bisa menunaikan tugas pekerjaannya tanpa cacat karena alasan sakit. Pelayanan kesehatan untuk anak-anak juga sangat penting karena anak-anak itu umumnya dibawah usia lima tahun. Dalam kondisi puncak seperti ini dukungan lingkungan masyarakat yang akrab untuk keluarga yang bekerja sangat diperlukan agar bisa dipelihara ketenangan keluarga muda yang bekerja penuh itu.

Kedua, untuk **keluarga dewasa** dengan isteri berusia **diatas 35 tahun** dan atau belum berusia 60 tahun, atau belum lansia. Keluarga seperti ini umumnya lebih mapan tetapi keperluan untuk anak-anaknya memasuki pendidikan tinggi telah bertambah besar

sehingga diperlukan kegiatan tambahan, baik diluar kantornya atau dirumah masing-masing. Dukungan komunitasnya berkembang dari pemacu agar keluarga muda bekerja dengan tenang, menjadi pemacu agar keluarga dengan anak-anak yang sedang tumbuh besar itu bisa memberikan dukungan ekonomi yang lebih kuat kepada keluarga yang keperluannya bertambah besar. Dukungan sosial dikembangkan menjadi dukungan ekonomi pedesaan yang lebih akrab lingkungan.

Dukungan dalam bidang KB, Kesehatan dan kegiatan keagamaan menjadi sangat penting karena kedua suami isteri yang sudah mulai menginjak posisi penting dalam lingkungan kerjanya harus tetap sehat, tidak mempunyai anak baru lagi, serta bisa memberikan tuntunan keimanan dan ketaqwaan kepada anak-anaknya yang mulai tumbuh menjadi anak remaja.

Ketiga, untuk *keluarga lansia* dengan isteri berusia *diatas 60 tahun* dan anak-anak yang mulai memisahkan diri dari orang tuanya. Bagi keluarga yang masih kuat, sehat dan mampu, harus bisa terus bekerja dengan pilihan yang secara fisik lebih ringan. Keluarga semacam ini harus tetap mendapat kesempatan untuk memberikan yang terbaik kepada tanah air dan bangsanya. Di desa-desa dapat didirikan pusat-pusat pendidikan dan pelatihan dimana tenaga yang mampu bisa menularkan ilmu dan pengalamannya untuk mereka yang lebih muda. Ada pula gagasan untuk mendirikan Universitas Usia Kedua yang memberi kesempatan kepada keluarga tua untuk mempersiapkan diri agar tetap berguna dan berjasa di masa tuanya.

Keempat, untuk *anak-anak remaja dibawah usia 20 tahun*. Kepada mereka BKKBN dapat mengadakan kerjasama lintas sektor dengan berbagai instansi lain untuk mengusahakan agar setiap anak remaja itu bersekolah. Kalau anak-anak itu terlanjur drop out, mereka dianjurkan untuk segera mengikuti kursus-kursus ketrampilan agar bisa mengejar kemampuan sebagai modal mempersiapkan perjuangan pada saat harus membentuk keluarga pada usia diatas 20 tahun. Mereka harus mendapat kesempatan untuk mempelajari masalah reproduksi secara luas.

Untuk para remaja itu, BKKBN, bisa bekerjasama dengan instansi terkait lain, mengembangkan program-program yang merangsang anak-anak remaja untuk tetap sekolah, mengembangkan pengetahuan tentang pengembangan kemasyarakatan yang luas, kemampuan tehnik pertanian, perindustrian dan perdagangan yang mendatangkan untung, serta mengikuti pelatihan lain yang bisa menunda atau mendewasakan usia perkawinan, menunda masa mengandung serta mempersiapkan diri secara mental dan fisik untuk menghadapi hidup berumah tangga pada era yang penuh persaingan.

Kelima, *pemberdayaan lingkungan masyarakat pada umumnya*. Proses pemberdayaan keluarga, yang akan menjadi sangat penting pada tahun 2002 nanti, sungguh akan menghadapi tantangan yang luar biasa. Proses itu harus mendapat dukungan masyarakat secara luas agar pengembangan itu dapat mengikuti tren dunia yang berpihak pada upaya dengan dukungan pengembangan sumber daya manusia dalam era globalisasi yang menganut sistem penghargaan yang tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi dan pengembangan kualitas yang tinggi. Pengembangan itu

harus memberi kesempatan pilihan yang demokratis karena setiap individu ***‘tidak boleh lagi dibina’***, mereka mempunyai hak untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan pilihannya yang terbaik. Peranan pemerintah yang dimasa lalu sangat dominan harus diubah menjadi peranan ***‘momong’*** dan ***‘fasilitasi’*** yang akrab dan penuh kebebasan.

Karena itu, dalam era otonomi daerah yang marak dewasa ini, Kepala BKKBN harus pandai-pandai ***‘menjual programnya’*** ke daerah-daerah untuk mendapatkan ***komitmen, dukungan operasional, baik tenaga maupun dana, serta partisipasi masyarakat yang luas.*** Tanpa komitmen, dukungan operasional, dan partisipasi masyarakat yang luas, upaya pemberdayaan keluarga yang dicita-citakan akan tetap menjadi impian belaka. Selamat bekerja Ibu Kepala yang baru. Selamat bekerja BKKBN melanjutkan upaya pemberdayaan keluarga dalam rangka membangun sumber daya manusia unggul yang sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara tercinta. Selamat Tahun Baru 1 Januari 2002, semoga sukses. (Prof. Dr. Haryono Suyono, Pengamat Masalah Sosial Kemasyarakatan)-bkkbn-keluarga-29122001